PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Putri Andini Az-Zahra

22110015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Putri Andini Az-Zahra

22110015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
NIM	: 22110015
Program Studi	: S1-Ilmu Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari tanggal , 2026

Pembimbing Pembantu	Pembimbing Utama
Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M. H	**Dr. Lilik Warsito, S.H., M. H., Sp. Not**
NUPTK: 2334770671130333	**NUPTK: 6438745646130072**

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1-Ilmu Hukum

Lailasari Ekaningsih, SH.,MH

NUPTK: 7450771672230222

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Nama Mahasiswa	: Putri Andini Az-Zahra
NIM	: 22110015
Program Studi	: S1-Ilmu Hukum

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI pada hari , tanggal

Dosen Penguji

Ketua Penguji : Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H., Sp.Not ( )

Anggota I : Dr. Muhammad Zainnudin, S.H., M.H ( )

Anggota II : Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H ( )

Disahkan oleh,

Dekan	Ketua Program Studi
Dr. Mohamad Tohari, SH., MH	**Lailasari Ekaningsih, SH.,MH**
NPP: 01061609690107	**NPP: 18101801930202**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Putri Andini Az-Zahra

NIM : 22110015

Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah Skripsi saya yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah Skripsi tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 17 September 2026

Yang membuat pernyataan,



Putri Andini Az-Zahra

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- "Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

  (Q.S Al-Insyirah: 5-6)

- Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan "seandainya" tapi katakan "Qadarullah" karena semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu selalui baik, karna Allah itu Maha Baik"

  (Ustadz Hannan Attaki)

- "Suro diro jayaningrat lebur dening pangastuti"

  (Segala sifat keras hati, kemarahan, dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan kebijaksanaan, kelembutan, dan kesabaran.)

Persembahan

- Orang Tua
- Adik Tercinta
- Dosen Pembimbing
- Bapak/Ibu Dosen Undaris
- *My Circle* (Andita Juan P.P., S.Sos, Citra Dinar E.M., Spd, Nazwa Cahya A)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melangsungkan Pernikahan Dini Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

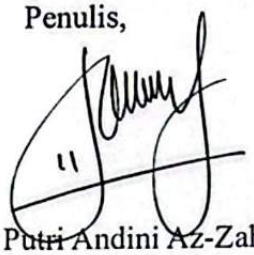
1. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI;
2. Bapak Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudriman GUPPI;
3. Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum;
4. Bapak Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H., Sp.Not, Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi;
5. Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI;
7. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, perhatian, dan semangat selama proses penyusunan skripsi.
8. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dalam penyusunan maupun pembahasannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya dalam

bidang hukum dan perlindungan anak, serta dapat menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melangsungkan pernikahan dini.

Semarang, September 2026

Penulis,



Putri Andini Az-Zahra

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Anak yang melangsungkan pernikahantetap mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta mengetahui hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang dalam kaitannya dengan praktik pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas perlindungan anak meliputi asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Keempat asas tersebut menjadi dasar dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melangsungkan pernikahan dini. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa anak yang melangsungkan pernikahan dini tetap memiliki hak atas pendidikan, kesehatan, serta tumbuh dan berkembang selama masih memenuhi kriteria sebagai anak menurut peraturan perundang-undangan. Status pernikahan tidak dengan sendirinya menghilangkan hak anak, sehingga perlindungan hukum tetap diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pernikahan Dini, Hak Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Abstract

Early marriage is a legal issue related to the protection and fulfillment of children's rights. Children who enter into marriage retain their legal status, possessing rights and interests that must be respected, protected, and fulfilled. This study aims to determine the principles of child protection as regulated in Law Number 23 of 2022 concerning Child Protection, and to understand children's rights to education, health, and development in relaton to the practice of early marriage. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials uses include primary legal materials im the form of laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of relevant books and scientific journals. The results indicate that the principles of child protection include non-discrimination, the best interests of the child, the right to life, survival, and development, and respect for the child's views. These four principles form the basis for providing protection to children who enter into early marriage. This research also shows that children who enter into early marriages still have the right to education, health care, and growth and development as long as they meet the criteria for children according to law. Marital status does not automatically eliminate a child's rights, so legal protection is still necessary to ensure the fulfillment of these rights, as stipulated in Law Number 35 of 2014.

Keywords: *Legal Protection, Children, Early Marriage, Children's Rights, Law Number 35 of 2014.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI xi

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 1

B. RUMUSAN PERMASALAHAN 10

C. TUJUAN PENELITIAN 10

D. MANFAAT PENELITIAN 11

E. OROGINALITAS PENELITIAN 12

F. SISTEMATIKA PENULISAN 16

BAB II 18

TINJAUAN PUSTAKA 18

A. Teori Perlindungan Hukum 18

B. Hak atas Pendidikan, Kesehatan, dan Tumbuh Kembang 25

BAB III 54

METODE PENELITIAN 54

A. Metode Pendekatan Masalah 54

B. Spesifikasi Penelitian 55

C. Metode Pengumpulan Data 56

D. Metode Analisis Data 58

BAB IV 60

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60

A. Asas Perlindungan Anak yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak....60

B. Hak Anak atas Pendidikan, Kesehatan, dan Tumbuh Kembang yang kaitannya Pernikahan Dini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak....75

BAB V....85

KESIMPULAN DAN SARAN....85

A. Kesimpulan....85

B. Saran....86

DAFTAR PUSTAKA....88

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pernikahan merupakan sebuah momen yang sangat suci dan memiliki pengaruh yang menyatukan dua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.[1] Bisa juga dikatakan bahwa pernikahan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, maka keluarga yang tercipta akan menjadi keluarga yang baik dan diakui secara hukum. Hukum pernikahan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [2] Mengingat betapa pentingnya ikatan pernikahan, seseorang semestinya telah siap baik secara fisik maupun mental dan sudah mencapai usia matang serta dewasa sebelum memutuskan untuk menikah. Karena tingkat kedewasaan sangat berpengaruh dalam sebuah rumah tangga. Banyak studi yang telah membuktikan bahwa menikah pada usia yang dini akan berujung pada tingginya angka perceraian, bahkan perceraian dini.

Setiap anak memiliki hak yang telah melekat sebagai manusia. Untuk itu negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan juga orang tua

---

[1] Farhan Zamzani, Miftahus Sholehudin, Prosesi "Malam Pacar" Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif *Maslahah Mursalah*, SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES Vol. 8 (2024), hlm. 346.

[2] Muhari Muhari, *Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban*. (Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, 2 (1), 2025), hlm. 3.

wajib mengakui dan menghormati hak anak. Hak-hak ini mencakup hak untuk jaminan kelangsungan hidup dan perkembangan fisik yang sehat maksimal, hak bermain, hak mengetahui orang tua dan anggota keluarga, hak dirawat, dipelihara, dan juga dididik orang tua, hak berpendapat, hak kebebasan berpikir dan beragama, anak juga berhak atas perlindungan hukum dari campur tangan tidak sah dan sewenang-wenang atas kehidupan dan keluarga, serta hak lain yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.[3]

Anak memegang kedudukan istimewa di tengah masyarakat yang diakui oleh hukum, sebab mereka berada dalam tahap tumbuh kembang yang penuh hak-haknya yang perlu dihargai, dilindungi, dan juga dipenuhi. Perspektif hukum anak tidak semata-mata dipandang sebagai seseorang yang memperlukan perlindungan namun juga subjek hukum yang memiliki hak serta kepentingan yang patut dihormati oleh hukum yang berlaku. Pemahaman terhadap anak semestinya berdasarkan pada pengertian hukum yang memberikan ketegasan mengenai status seseorang sebagai anak.

Sistem hukum nasional, pengertian anak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1, anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Ketentuan tersebut menjadi landasan utama dalam

[3] Cik Marhayani, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, M. Imanuddin, Analisis Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Legalitas, hlm.61.

menentukan batas usia sekaligus kedudukan seseorang sebagai anak dalam hukum perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 menjelaskan yang dimaksud anak adalah anak yang berusia 18 tahun, kemudian batas boleh menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu 19 tahun. Artinya, ada masa transisi dari yang dikatakan anak menuju dewasa, pada selisih jeda ini mungkin dikatakan masa persiapan. Pada ketentuan ini dalam syarat usia menikah diaturan tidak menyebutkan usia 19 tahun itu kategori dewasa, hanya syarat untuk menikah bukan syarat untuk dikatakan dewasa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bidang ketenagakerjaan, menetapkan bahwa anak merupakan seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan penggunaan batas usia 18 tahun sebagai salah satu acuan dalam menentukan status anak dalam hukum nasional, meskipun penerapannya berada dalam konteks hubungan kerja.

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum serta mempunyai hak yang harus dihormati dan dilindungi. Hak anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa anak memiliki hak dan kepentingan yang diakui oleh hukum, sehingga diperlukan jaminan perlindungan agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi secara optimal.

Pengaturan mengenai usia anak perlu dibedakan dengan ketentuan mengenai batas minimum usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kategori anak. Perbedaan batas usia tersebut menunjukkan bahwa status seseorang sebagai anak dan persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan merupakan dua hal yang memiliki dasar dan fungsi hukum yang berbeda.

Perbedaan batas usia tersebut menjadi penting dalam pembahasan mengenai anak yang melangsungkan pernikahan dini. Seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tetap memiliki kedudukan sebagai anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Meskipun perkawinan dalam keadaan tertentu dilaksanakan melalui mekanisme dispensasi, status perkawinan tersebut tidak secara otomatis menghilangkan kedudukan hukum seseorang sebagai anak selama usianya masih di bawah 18 tahun.

Pengertian anak dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menentukan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Ketentuan mengenai batas usia tersebut diperkuat oleh sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang juga menggunakan usia 18 tahun sebagai batas penting dalam menentukan kedudukan seseorang sebagai anak. Undang-Undang Administrasi Kependudukan memiliki fungsi dalam pencatatan serta penetapan status hukum penduduk dan tidak menjadi dasar utama dalam menentukan batas usia anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, beberapa tujuannya adalah menaikkan batas umur bagi wanita untuk menikah serta memastikan hak warga negara dalam membangun rumah tangga dan mempunyai anak. Sehingga jika batas usia minimal pernikahan bagi wanita disamakan dengan batas usia minimal pernikahan bagi pria (19 tahun) maka negara diperbolehkan secara hukum untuk menyetujui pernikahan.[4] Hal ini diberlakukan untuk menghasilkan kepastian hukum yang dimana memberikan perlindungan kepada masyarakat itu sendiri dalam aspek hukum pernikahan.

Mengenai aturan Pernikahan yang berlaku di Indonesia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa: "Pernikahan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai sepasang suami dan istri yang mempunyai tujuan untuk membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan juga abadi dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa." Unsur keagamaan pada pernikahan juga dilibatkan sehingga menjadikan pernikahan itu suci, dan juga melibatkan aspek hukum atau pemerintahan sehingga tercipta perjanjian yang mengikat. Pernikahan atau upacara pengikat janji yang dilakukan oleh dua individu dengan tujuan untuk meresmikan hubungan pernikahan menurut norma-norma agama, hukum, dan norma sosial.[5]

---

[4] Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari, *"Implementasi Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*. Binamulia Hukum, Vol. 11, No. 1, (2022), hlm. 60-62.

[5] Dewi Iriani, *Analisis Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam UU No. 1Tahun 1974.* (Justitia Islamica, 12 (1), 2025), hlm. 98

Menikah bukanlah suatu proses yang sederhana dan hanya berlangsung dalam waktu sehari tetapi mengikat kedua individu seumur hidup. Pasangan yang akan menikah harus benar-benar memahami tentang agama, norma dan peraturan yang telah berlaku dalam masyarakat. Supaya dapat menjalani hidup sehari-hari manusia pada umumnya menghadapi macam-macam hak sekaligus kewajiban. Tuntutan untuk mendapatkan hak yang ada jadi semakin jelas jika pemenuhannya berkaitan erat dengan keperluan pokok, contohnya seperti rumah, makanan, baju, serta tanah.

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tertulis jelas bahwa "Setiap orang berhak untuk membangun keluarga dan mempunyai keturunan melalui pernikahan yang sah." Walaupun Undang-Undang sudah menetapkan batas usia untuk menikah seperti itu, hal tersebut tetap tidak menutup kemungkinan seseorang untuk menikah dibawah umur tersebut.[6] Melihat banyak sekali kejadian pernikahan dini beserta konsekuensi yang akan timbul, maka sangatlah penting bagi kita untuk membuat masyarakat sadar bahwa pernikahan dini perlu dicegah. Peraturan yang diperbolehkannya anak melanjutkan pendidikan berada dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat."

Jumlah pernikahan anak dibawah umur sungguh menimbulkan kekhawatiran sebab biasanya pernikahan dini berujung dengan putusnya sekolah akibat ketentuan

---

[6] Sri Rahmawaty Yunus, Amad Faisal, *"Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)"*, (Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ), 3, 2018. hlm. 88

sekolah yang masih berlaku sampai kini, belum ada ketentuan soal peraturan yang mewajibkan siswa yang menikah harus dikeluarkan. Keputusan dikeluarkan atau tidaknya akhirnya bergantung pada kebijakan daerah masing-masing dan sekolah tempat siswa tersebut bersekolah.[7]

Sebelum merencanakan sebuah pernikahan seseorang harus benar-benar paham apakah dirinya sudah siap dan memang layak untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Akibat dari pernikahan dini sangat berpengaruh, baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan juga kesehatan. Dalam aspek sosial, anak-anak yang menikah pada usia belia sering kali terpaksa putus sekolah yang dimana dapat menurunkan tingkat pendidikan di antara generasi muda serta membuat mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan yang layak dikemudian hari. Pernikahan dini dapat memicu masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi yang timbul muncul akibat tekanan yang besar untuk memenuhi tanggung jawab pada peran baru.[8] Aspek ekonomi, banyak anak perempuan yang telah menikah dini tidak mampu ikut serta dalam dunia kerja dengan sebaik-baiknya, akibatnya mereka rentan mengalami pendapatan yang sangat kecil, hal ini mempengaruhi keadaan keuangan rumah tangga menjadi kurang stabil.[9]

Bahaya kesehatan juga bertambah, sebab perempuan yang menikah dibawah umur memiliki kemungkinan kematian disaat bersalin jauh lebih tinggi dibanding

---

[7] Sonny Dewi Judiasih, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari, *"Implementasi Hak Pendidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur."* (Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, 2, (2), 2022. hlm. 101-102

[8] Imelda Triadhari, Mumtaz Afridah, Hana Haifah Salsabila, *"Dampak Psikologis Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon."* (Spiritualita 7, 2, 2023). hlm. 92

[9] Jureid, Rita Defriza, Muhlisah Lubis, Siti Khodijah, Nur Saniah, *Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Mandailing Natal.* (Journal Of Social Science Research, 3 (6), 2023). hlm. 5536

wanita yang sudah dewasa. Kesehatan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang belum cukup umur rentan terkena masalah kesehatan, seperti lahir sebelum waktunya (*premature*) dan kekurangan gizi.[10] Secara menyeluruh, efek dari pernikahan dini sangat rumit dan berkaitan satu sama lain, serta menimbulkan kesulitan besar bagi individu dan juga masyarakat. Undang-Undang yang sangat relevan untuk melindungi hak anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini menetapkan bahwa anak adalah individu yang usianya belum genap delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menekankan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, dan juga tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak adil.

Sejumlah alasan yang mendorong individu untuk segera melangsungkan sebuah pernikahan, antara lain untuk mempertahankan garis keturunan, kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, keyakinan terhadap kyai, dan untuk menghindari munculnya fitnah dari lingkungan masyarakat.[11] Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban melindungi anak dari pernikahan dini. Namun, pasal tersebut sama seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak disertai ketentuan sanksi pidana, sehingga membuat peraturan

---

[10] Aisah Amalia, *"Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: Literature Review."*. (Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda, 2, 2023). hlm. 128

[11] Ainur Mila Rofika, Iswari Hariastuti, *Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep*, (The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education, 8, 1, Maret 2020), hlm. 16

ini hampir tidak memiliki makna dalam usaha melindungi anak.[12] Perkawinan anak yang disebabkan oleh desakan orang tua dapat diklasifikasikan sebagai pernikahan paksa, karena anak belum mampu memberikan persetujuan atau keputusan secara matang.

Anak-anak adalah anugerah dan tanggung jawab dari Tuhan yang wajib selalu dirawat dan dipertahankan karena mereka memiliki nilai, kehormatan, serta hak-hak sebagai manusia yang patut dihormati. Hak asasi anak merupakan elemen dari hak asasi manusia yang terantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak anak. Anak merupakan penerus kehidupan, harapan bangsa dan negara. Anak mencerminkan gambaran masa depan bangsa di kemudian hari, generasi yang melanjutkan aspirasi bangsa, sehingga setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan hukum.[13]

Kedudukan anak sebagai generasi muda akan meneruskan cita-cita mulia bangsa, calon pemimpin bangsa di masa depan, serta sumber harapan bagi generasi sebelumnya, memerlukan perlindungan agar dapat memperoleh kesempatan besar untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.[14] Perkawinan yang terjadi di bawah umur melibatkan anak-anak dan dikendalikan oleh keluarga serta anggota masyarakat yang terlibat dalam proses perjodohan. Perkawinan anak-anak ini merupakan bentuk tradisi atau adat istiadat

---

[12] Yusmar Wulangow, Josepsus J. Pinori, Nixon Wulur, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019,* (Lex Administratum, 2022), hlm. 2

[13] Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak,* (Indonesia, Jakarta, 2017), hlm. 1

[14] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,* (Refika ADITAMA, 2012), hlm. 97

yang timbul dari perpaduan antara aspek sosial, budaya, dan faktor ekonomi.[15]

Beranjak dari latar belakang masalah, hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melangsungkan Pernikahan Dini Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan menitikberatkan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

a) Bagaimana Asas perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002?
b) Bagaimana hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang bagi anak yang melaksanakan pernikahan dini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Oleh karena itu sangat penting untuk menentukan tujuan dari suatu penelitian agar terdapat suatu pedoman dalam menentukan langkah penelitian, antara lain:

---

[15] Soni Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Betty Rubiati, Hazar Kusmayanti, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,* (Bandung, 2018), hlm. 3

a) Untuk mengetahui asas perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

b) Untuk mengetahui hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang bagi anak yang melaksanakan pernikahan dini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomro 23 Tahun 2002

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penjabaran pada tujuan pemecahan permasalahan, dimaksudkan agar penulisan hukum ini dapat memperdalam pemahaman berkenaan dengan permasalahan tersebut yang pada akhirnya memberikan suatu manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis

   a. Memberikan sumbangasih pemikiran serta kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan anak, serta menjadi evaluasi bagi penulis, mahasiswa, akademis, dan peneliti dalam memahami konsep dan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

   b. Memberikan penjelasan secara akademis mengenai konsep dan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap anak, khususnya yang berkaitan dengan praktik pernikahan dini;

c. Memberikan pemahaman dan kajian ilmiah terkait kedudukan hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta tumbuh kembang dalam kaitannya dengan praktik pernikahan dini berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

d. Menjadi referensi akademik dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak serta implikasi hukum dari praktik pernikahan dini dalam perspektif hukum perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangasih pemikiran bagi pembuat kebijakan, pemerintah, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya perlindungan anak mengenai pentingnya penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang melangsungkan pernikahan dini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Serta memberikan masukan kepada pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

E. OROGINALITAS PENELITIAN

Sebagai upaya menunjukkan adanya perbedaan dan kebaruan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pernikahan dini dan perlindungan terhadap anak. Penelitian-penelitian

tersebut ditelaah untuk mengetahui keterkaitan, persamaan, serta perbedaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan kajian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan dan Orisinalitas Penelitian
1.	Dewi Iriani	Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum.	Sama-sama berkaitan dengan persoalan pernikahan dini dan aspek hukum perkawinan.	Penelitian Dewi Iriani lebih menitikberatkan pada batas usia perkawinan, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang melangsungkan pernikahan dini berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2.	Alvina Rivini Trulia Mokolensang, dkk	Mengkaji hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 dalam kaitannya	Sama-sama menggunakan UU No. 35 Tahun 2014 dan	Penelitian ini lebih memfokuskan pada asas perlindungan anak serta kedudukan hak anak atas pendidikan, kesehatan,

		dengan pernikahan dini.	membahas hak anak dalam kaitannya dengan pernikahan dini.	dan tumbuh kembang setelah melangsungkan pernikahan dini.
3.	Muhari	Membahas penerapan ketentuan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin.	Sama-sama berkaitan dengan perkawinan anak dan ketentuan hukum perkawinan.	Penelitian ini tidak menjadikan dispensasi kawin sebagai fokus utama, tetapi mengkaji perlindungan hukum terhadap anak setelah melangsungkan pernikahan dini berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014.
4.	Komang Krisna Prema, dkk	Mengkaji pemenuhan hak tumbuh kembang anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014.	Sama-sama menggunakan UU No. 35 Tahun 2014 dan membahas	Penelitian ini mengaitkan hak tumbuh kembang dengan anak yang telah melangsungkan pernikahan dini, serta

			hak tumbuh kembang anak.	menganalisisnya bersama hak pendidikan dan kesehatan serta asas perlindungan anak.
5.	Sonny Dewi Judiasih, dkk	Mengkaji pemenuhan hak pendidikan bagi anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur	Sama-sama membahas hak anak yang telah melakukan perkawinan di usia anak dan hak pendidikan.	Penelitian ini tidak hanya mengkaji hak pendidikan, tetapi juga hak kesehatan dan tumbuh kembang serta asas perlindungan anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil perbandingan tabel 1.1, terdapat sejumlah kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, terutama dalam hal pembahasan mengenai pernikahan dini, perlindungan anak, dan pemenuhan hak-hak anak yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, penelitian ini mempunyai ruang lingkup kajian yang berbeda. Penelitian ini memussatkan pembahasan pada perlindungan hukum bagi anak yang telah melangsungkan pernikahan dini perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya berkaitan dengan penerapan asas perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta tumbuh dan berkembang.

Letak kebaruan penelitian ini berada pada analisis mengenai perlindungan hak anak yang tetap melekat setelah anak melakukan pernikahan. Ketentuan mengenai batasan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 menjadi dasar dalam menentukan kedudukan hukum tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, status perkawinan tidak menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan berakhirnya status sebagai anak, karena kedudukan tersebut tetap ada selama seseorang masih memenuhi kriteria anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan mengacu pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Strata 1 Ilmu Hukum UNDARIS. Di dalam skripsi ini terbagi atas lima bab dan masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Berikut adalah sistematika yang akan disajikan:

BAB I, Pendahuluan yang tersaji atas latar belakang sebagai dasar permasalahan. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang menganalisa masalah sebagai landasan penelitian. Melalui tujuan dan kerangka teori memberikan keterbukaan pemikiran atas permasalahan yang sedang dihadapkan. Diperoleh manfaat dari sebuah penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Putaka yang dijadikan landasan berpikir dalam menganalisa permasalahan melalui pemaparan dasar hukum, landasan hukum yang memiliki keterkaitan dengan realita menuju penyelesaian rumusan masalah.

Landasan teoritik dalam tinjauan pustaka akan memberikan jawaban dan kerangka teoritis.

BAB III, Metode Penelitian yang menyajikan prosedural penelitian yang dilakukan. Dalam hal penelitian hukum normatif, bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan menerapkan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Dengan menggunakan bahan hukum sekunder sebebagai data utama, penelitian ini mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melangsungkan Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dalam mengaktualisasi hasil studi kepustakaan, diperlukan bahan hukum sekunder untuk menyusun proposal mulai dari dasar hukum dan regulasi kebijakan dalam permasalahan.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan pengumpulan data melalui tahapan studi pustaka. Dalam hal ini jawaban atas rumusan masalah yang telah tersaji.

BAB V, Simpulan dan Saran yang memuat kristalisasi dari keseluruhan atas ketercapaian dalam masing-masing bab sebelumnya dengan memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep yang menggambarkan peran hukum dalam menjaga hak, kepentingan, dan kehormatan setiap orang yang menjadi subjek hukum. Melalui perlindungan hukum, negara berkomitmen untuk memastikan pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak setiap individu demi mencapai keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat serta menghindari perbuatan yang semena-mena. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Perlindungan adalah menyiratkan tempat berlindung atau memperlindungi.[16]

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan upaya memberikan jaminan terhadap hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum. Perlindungan hukum diperlukan agar setiap individu memperoleh pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap hak yang dimilikinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antara subjek hukum, tetapi juga memberikan jaminan agar hak dan kepentingan yang diakui oleh hukum dapat dipertahankan. Pengertian tersebut dalam konteks hukum dapat dikembangkan menjadi suatu upaya yang dilakukan berdasarkan norma dan mekanisme hukum untuk memberikan perlindungan kepada seseorang dari

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Perlindungan

tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingannya. Perlindungan hukum dengan demikian mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan hak, karena perlindungan diberikan agar hak yang dimiliki seseorang dapat dihormati dan dipenuhi.

Perlindungan hukum pada dasarnya berlaku bagi setiap subjek hukum. Setiap individu memiliki kedudukan sebagai pihak yang mempunyai hak sekaligus kewajiban dalam hubungan hukum. Oleh karena itu, hukum harus memberikan jaminan agar seseorang dapat menggunakan dan mempertahankan haknya serta memperoleh perlindungan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut. Perlindungan hukum tidak hanya berupa larangan terhadap suatu perbuatan, tetapi juga meliputi penyediaan mekanisme hukum yang memungkinkan seseorang memperoleh pemulihan apabila haknya telah dilanggar.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga hak dan kepentingan individu dengan memberikan wewenang kepadanya agar dapat bertindak untuk kepentingan tersebut. Dampak dari perlindungan hukum dapat dipahami sebagai hasil yang muncul akibat penerapan hukum dalam menjamin hak-hak masyarakat, sehingga menghasilkan keadilan dan keteraturan dalam kehidupan sosial. [17] andangan tersebut menempatkan kepentingan manusia sebagai bagian penting dari fungsi hukum. Hukum tidak hanya menetapkan aturan mengenai perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, tetapi juga memberikan kewenangan kepada subjek hukum untuk mempertahankan kepentingannya melalui sarana hukum yang tersedia.

---

[17] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Pemikiran Satjipto Rahardjo tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum mempunyai hubungan langsung dengan hak. Seseorang yang mempunyai hak memerlukan perlindungan agar hak tersebut tidak dilanggar atau dirampas oleh pihak lain. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya menjamin agar kepentingan yang telah diakui oleh hukum dapat diwujudkan dan dipertahankan oleh pemiliknya.

Selanjutnya menurut, Philip M. Hadjon perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kehormatan dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki setiap subjek hukum. Perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.[18]

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mencegah atau menghindari terjadinya tindakan yang merugikan kepentingannya. Perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui pembentukan aturan yang memberikan batasan, larangan, kewajiban, maupun prosedur tertentu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme hukum untuk menyelesaikan persoalan serta memberikan

---

[18] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2000), hlm. 10.

pemulihan terhadap pihak yang haknya telah dirugikan.[19] Dengan demikian, perlindungan represif mempunyai fungsi untuk memberikan penyelesaian hukum ketika perlindungan preventif tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran.

Pembagian perlindungan hukum menjadi preventif dan represif menunjukkan bahwa fungsi hukum dalam memberikan perlindungan tidak hanya bekerja setelah terjadinya pelanggaran. Hukum juga mempunyai fungsi pencegahan melalui pembentukan norma yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perlindungan preventif, potensi pelanggaran terhadap hak dapat diminimalkan, sedangkan perlindungan represif menyediakan mekanisme untuk mengatasi pelanggaran yang telah terjadi.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak yang berkuasa yang tidak sesuai dengan hukum, sehingga tercipta ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.[20] Pendapat Setiono menekankan pentingnya hukum sebagai pembatas terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Dengan demikian, perlindungan hukum juga berkaitan dengan prinsip bahwa penggunaan kekuasaan harus tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.

Pandangan Setiono menunjukkan bahwa perlindungan hukum ini tidak hanya mencakupi interaksi antar individu, tetpi juga dapat terkait dengan hubungan antar individu dan institusi yang berwenang. Hukum berfungsi sebagai instrumen

---

[19] *Ibid*

[20] Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2004), hlm. 3.

pembatas agar kewenangan tidak disalahgunakan. Perlindungan hukum memiliki ikatan erat dengan asas supermasi hukum, yang menekankan bahwa segala perbuatan pasti tunduk pada ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu rangkaian upaya yang menggunakan norma dan mekanisme hukum untuk menjamin hak serta kepentingan subjek hukum. Perlindungan hukum mempunyai sifat preventif karena bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dan mempunyai sifat represif karena memberikan mekanisme penyelesaian serta pemulihan ketika pelanggaran telah terjadi.

Perlindungan hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan kepastian mengenai hak dan kewajiban. Suatu hak akan memperoleh perlindungan yang lebih efektif apabila hukum secara jelas menentukan siapa yang mempunyai hak, siapa yang mempunyai kewajiban, serta bagaimana hak tersebut dapat dipertahankan. Oleh karena itu, norma hukum yang memberikan perlindungan harus menjadi pedoman bagi subjek hukum maupun pihak yang mempunyai kewajiban untuk menghormati dan memenuhi hak tersebut.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap masyarakat adalah kewajiban negara, pemerintah, keluarga, orang tua, serta masyarakat itu sendiri mencakup perlindungan agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial.[21] Kualitas perlindungan hukum untuk anak-anak perlu setara dengan perlindungan bagi orang dewasa, karena pada dasarnya setiap individu memiliki status yang sama di hadapan hukum.

---

[21] Syamsul Haling, Paisal Haling, Syamsiah Badruddin, dan Hardianto Djanggih, *"Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional"*, Jurnal Hukum & Pembanguna, Vol. 48 No. 2 (2018), hlm. 361.

Pernikahan seharusnya dilakukan oleh individu yang telah mencapai usia dewasa. Dewasa pada hakikatnya mencakup aspek-aspek terkait dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang telah dilakukannya, yang di mana menunjukkan kemampuan individu untuk bertindak di bawah hukum perdata. Sesungguhnya, pernikahan dini masih banyak terjadi. Pernikahan dini dilihat sebagai jalan keluar dari segala masalah orang dewasa dengan mengorbankan anak perempuan. Masalah moral yang berawal dari pandangan negatif orang dewasa terhadap anak, keuangan orang tua yang mengalami kesulitan, keinginan untuk memiliki keturunan, dan tekanan tradisi yang di mana cara menyelesaikannya dengan cara menikahkan anak.

Teori perlindungan hukum mempunyai kedudukan yang penting karena anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak, tetapi juga berada dalam kondisi yang membutuhkan perlindungan. Perlindungan terhadap anak tidak hanya berupa perlindungan dari tindakan yang merugikan, tetapi juga mencakup upaya menjamin agar hak anak dapat terpenuhi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak harus diarahkan pada kepentingan dan perkembangan anak sebagai subjek hukum.

Perlindungan terhadap anak juga berkaitan dengan prinsip bahwa anak harus memperoleh kesempatan yang layak untuk menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan. Anak mempunyai hak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak tersebut.

Prinsip perlindungan hukum tersebut mempunyai hubungan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Setiap kebijakan, tindakan, atau keputusan yang berkaitan dengan anak harus memperhatikan kepentingan dan hak anak sebagai pertimbangan utama. konteks perlindungan anak, prinsip tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian prosedural, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan substantif anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dengan demikian tidak dapat hanya dipahami sebagai pemberian perlindungan setelah terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan juga harus diberikan sejak sebelum suatu tindakan yang dapat memengaruhi kehidupan anak dilakukan. Pembatasan usia perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan preventif karena hukum memberikan batas terhadap tindakan yang berkaitan dengan perkawinan anak.

Selain perlindungan preventif, hukum juga harus menyediakan perlindungan setelah terjadi suatu keadaan yang berpotensi merugikan anak. Apabila anak telah berada dalam suatu hubungan atau kondisi yang menimbulkan pelanggaran terhadap haknya, maka mekanisme hukum harus dapat memberikan perlindungan dan pemulihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan preventif dan represif merupakan dua bentuk yang saling melengkapi.

Kaitannya dengan penelitian tentang anak yang melangsungkan pernikahan dini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan bagaimana hukum tetap memberikan perlindungan ketika perkawinan tersebut telah berlangsung.

Perlindungan preventif dapat dilihat dari pengaturan batas usia minimum perkawinan dan ketentuan mengenai dispensasi, sedangkan perlindungan setelah perkawinan dapat dianalisis melalui jaminan atas pemenuhan hak anak dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Teori perlindungan hukum juga digunakan untuk menilai bagaimana mekanisme dispensasi kawin ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak. Dispensasi sebagai pengecualian terhadap batas usia perkawinan harus diterapkan berdasarkan ketentuan hukum dan tetap memperhatikan kepentingan anak. Oleh karena itu, keberadaan dispensasi tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan terhadap kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

Suatu mekanisme hukum berdasarkan teori perlindungan hukum, dapat dinilai memberikan perlindungan apabila terdapat norma yang mencegah pelanggaran, terdapat prosedur yang memberikan jaminan terhadap hak subjek hukum, dan terdapat mekanisme yang dapat digunakan ketika terjadi pelanggaran. Ketiga unsur tersebut dapat digunakan untuk menganalisis batas usia perkawinan, proses dispensasi, dan pemenuhan hak anak setelah perkawinan.

B. Hak atas Pendidikan, Kesehatan, dan Tumbuh Kembang

1. Pengertian Hak

Hak merupakan salah satu konsep dasar dalam hukum yang berkaitan dengan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum. Secara umum, hak dapat dipahami sebagai kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh, melakukan, atau menuntut sesuatu yang mendapat pengakuan dan perlindungan berdasarkan hukum. Dengan

adanya hak, seseorang memiliki kepentingan yang dapat dipertahankan dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hak menunjukkan adanya suatu kepentingan atau kewenangan yang diberikan kepada seseorang dan memperoleh perlindungan melalui norma hukum. Hak menjadi salah satu dasar dalam menentukan hubungan antara subjek hukum karena keberadaan hak pada satu pihak pada umumnya berhubungan dengan adanya kewajiban pada pihak lainnya. Hak tidak hanya berkaitan dengan apa yang dapat diperoleh atau dilakukan seseorang, tetapi juga berkaitan dengan adanya kewajiban untuk menghormati dan memenuhi hak tersebut.

Hak seseorang dalam kerangka hukum tidak hanya ditentukan oleh posisi sosialnya, tetapi juga oleh pengakuan dan perlindungan yang telah disediakan oleh hukum. Menurut Hans Kelsen, menyatakan bahwa hak adalah hasil dari norma hukum yang memberikan izin atau perlindungan kepada seseorang dengan koneks hubungan hukum.[22] Oleh karene itu, hak seseorang muncul dan diakui sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku dalam sistem hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Soedjono Dirdjosisworo yang menjelaskan bahwa hak adalah wewenang yang dimiliki individu menurut hukum untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu yang dijamin oleh ketentuan hukum dalam konteks hubungan dengan orang lain.[23]

---

[22] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State,* Bandung: Nusa Media hlm. 115
[23] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Rajawali, hlm. 119.

Riduan Syahrani menegaskan bahwa menegaskan bahwa hak adalah kepentingan yang dijaga oleh aturan hukum dan diberikan kepada seseorang untuk dilindungi serta dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[24] Mengenai hak, Roscoe Pound menyatakan bahwa hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. [25] Sedangkan Lili Rasjidi berpendapat bahwa hak timbul sebagai akibat dari kedudukan seseorang sebagai subjek hukum.[26] Oleh karena itu, hak berfungsi sebagai cara untuk melindungi kepentingan pribadi dalam sistem ukum dan juga menjadi landasan bagi individu untuk mendapatkan kepastian serta jaminan hukum terkait dengan kepentingannya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa hak pada dasarnya merupakan kepentingan atau kewenangan yang melekat pada seseorang sebagai subjek hukum dan memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum. Hak memberikan dasar kepada seseorang untuk memperoleh atau melakukan sesuatu yang menjadi kepentingannya, sedangkan hukum memberikan jaminan agar hak tersebut dapat dihormati dan dipenuhi. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu hubungan hukum.

Pemahaman mengenai hak menjadi penting karena anak merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Kedudukan anak sebagai subjek hukum berarti anak bukan

---

[24] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

[25] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, hlm. 55

[26] Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

hanya merupakan pihak yang harus memperoleh perlindungan, tetapi juha merupakan pemegang hak yang kepentingannya harus diakui dalam sistem hukum.

Hak anak mencakup berbagai kepentingan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, antara lain hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, memperoleh layanan kesehatan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari kepentingan hukum anak yang harus dijamin agar anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Kaitannya dengan penenlitian mengenai perlindungan gukum terhadap anak yang melangsungkan pernikahan dini, teori hak digunakan untuk menjelaskan bahwa perkawinan tidak dengan sendirinya menghilangkan hak yang melekat pada anak. Apabila seseorang masih memenuhi kriteria sebagai anak Ketentuan peraturan perundang-undangan, maska kedudukannya sebagai pemegang hak tetap harus diperhatikan. Perubahan status perkawinan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan kepentingan dan hak anak yang telah dijamin oleh hukum.

Teori hak tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk memahami hak atas pendidikan, kesehatan, serta tumbuh dan berkembang. Ketiga hak tersebut merupakan kepentingan hukum yang memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan dan harus dihormati oleh pihak-pihak yang mempunyai kewajiban terhadap anak. Oleh karena itu, pembahasan

mengenai hak pendidikan, kesehatan, serta tumbuh dan berkembang perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memahami bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melangsungkan pernikahan dini.

2. Hak atas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap anak. Perspektif perlindungan anak, pendidikan mempunyai kedudukan penting karena melalui pendidikan anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, kepribadian, dan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan bagian dari upaya menjamin tumbuh dan berkembangnya anak secara optimal.

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada setiap anak sebagai subjek hukum. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga mempunyai peran dalam mendukung perkembangan kepribadian, kemampuan intelektual, dan partisipasi anak dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap anak.

Hak atas pendidikan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. UNESCO menjelaskan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi sarana penting untuk mengembangkan kemampuan manusia secara utuh serta memungkinkan

seseorang berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat.[27] Dengan demikian, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial, tetapi juga sebagai hak yang wajib dihormati dan dijamin.

Menurut Katarina Tomasevski pengembangan konsep hak atas pendidikan memperkenalkan kerangka 4-A, yaitu *availability* (ketersediaan), *accessibility* (keterjangkauan dan aksesibilitas), *acceptability* (dapat diterima), dan *adaptability* (dapat disesuaikan). Kerangka tersebut menggambarkan kewajiban negara dalam merealisasikan hak atas pendidikan. Pendidikan harus tersedia, dapat diakses tanpa diskriminasi, memiliki bentuk dan isi yang dapat diterima, serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan masyarakat.[28]

Konsep tersebut memberikan pemahaman bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan lembaga pendidikan. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa anak dapat mengakses pendidikan tanpa diskriminasi, memperoleh pendidikan yang layak dan dapat diterima, serta mendapatkan sistem pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya. Dengan demikian, hak atas pendidikan mempunyai dimensi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

---

[27]Majda El Muhtaj, M. Fahmi Siregar, Reh Bungana Beru PA, dan Fazli Rachman, "Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 369–386..

[28] Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Bantuan Dana Bank dalam Perspektif Pemenuhan Hak-hak EKOSOB: Studi Kasus pada Sektor Pendidikan di Indonesia", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 164.

Perlindungan anak merupakan isu yang sangat penting dalam aspek pengembangan sosial dan pendidikan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 di Indonesia berperan sebagai landasan hukum yang mengatur perlindungan anak, memberikan kerangka bagi orang tua dan masyarakat untuk memahami kewajiban dan hak mereka dalam mengasuh serta menjaga anak.

Undang-undang ini menegaskan bahwa seluruh anak berhak mendapat pendidikan, perawatan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Pelaksanaan undang-undang ini sering menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pemahaman dan praktik oleh para orang tua. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam memajukan kualitas sumber daya manusia, yang berarti pendidikan merupakan sektor terpenting bagi kemajuan suatu negara, sebab melalui pendidikanlah tercipta kehidupan yang lebih baik. Penurunan dalam bidang pendidikan akan menambah peluang untuk tertinggal.

Keadaan pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna karena situasi pendidikan di negeri ini sangat memprihatinkan. Indonesia juga tetap berupaya melalui berbagai cara untuk memperbaiki pendidikan. Sasaran utamanya adalah agar seluruh anak bangsa Indonesia dapat menggapai pendidikan yang pantas tanpa pengecualian apapun.

Hak untuk menerima pendidikan sudah diakui bagi seluruh warga negara dalam UUD 1945. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002, yang menegaskan bahwa "setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran demi perkembangan dirinya serta potensi kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya."

Hak untuk mendapatkan pendidikan seharusnya merupakan milik setiap anak bangsa. Hal ini dikarenakan pendidikan itu sendiri merupakan satu bentuk hak asasi manusia yang telah melekat pada setiap individu. Dan hak asasi manusia atas pendidikan berfungsisebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan setiap orang, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara demi mencetak generasi yang berkualitas. Ketentuan mengenai hak pendidikan untuk anak juga diatur dalam. Pasal 28b dinyatakan bahwa "setiap anak berhak atas pendidikan yang berkualitas, pendidikan dasar harus tersedia tanpa biaya, pendidikan menengah seharusnya dapat diakses, dan anak-anak didorong untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat yang memungkinkan. Disiplin yang diterapkan di sekolah-sekolah hendaknya tetap menghirmati hak serta martabat anak."

Hak atas pendidikan anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1) menentukan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan

bakat.[29] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak anak yang memperoleh perlindungan secara langsung melalui peraturan perundang-undangan.

Hak atas pendidikan juga memperoleh landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional yang berlaku bagi setiap warga negara, termasuk anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak pendidikan anak merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara.

Kaitannya dengan perlindungan anak, pemenuhan hak pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan tumbuh dan berkembangnya anak. Pendidikan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan dan potensinya. Oleh karena itu, segala tindakan yang menyebabkan anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan perlu dipertimbangkan dari perspektif perlindungan hak anak.

Hal tersebut menjadi relevan dalam konteks anak yang melangsungkan perkawinan dini. Status perkawinan tidak secara otomatis menghilangkan hak anak atas pendidikan apabila yang bersangkutan masih memenuhi kriteria sebagai anak menurut peraturan perundang-undangan.

---

[29] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1), hlm. 6.

Perubahan status seseorang dalam teori hak tidak dengan sendirinya menghapus suatu hak yang telah diberikan oleh hukum. Dengan demikian, anak yang telah melangsungkan perkawinan tetap mempunyai hak memperoleh pendidikan selama masih berkedudukan sebagai anak menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila diterapkan pada model 4-A Tomasevski, perlindungan hak Pendidikan bagi anak yang menjalani pernikahan dini dapat dipandang dari berbagai perspektif. Pertama, **ketersediaan (*availability*)**, yang mengacu pada keberadaan institusi dan sarana Pendidikan yang dapat dijangkau anak. Kedua, **aksesibilitas (*accessibility*)**, yang berarti anak dapat menerima pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk yang terkait status pernikahan. Ketiga, **akseptabilitas (*acceptability*)**, di mana pendidikan yang diberikan mesti sesuai dengan kualitas serta menghormati keperluan dan haka nak. Keempat, **adaptabilitas (*adaptability*)**, yang mengindikasikan sistem Pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi dan keperluan siswa agar hak Pendidikan tetap terpenuhi.

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak yang telah menikah tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa anak "tetap boleh bersekolah". Perlindungan hukum harus menjamin adanya akses nyata terhadap pendidikan. Dengan demikian, apabila status perkawinan menjadi alasan untuk menutup akses anak terhadap pendidikan, kondisi tersebut perlu dinilai dari perspektif pemenuhan hak anak.

Dengan demikian, dalam perspektif perlindungan hukum terhadap anak yang melangsungkan perkawinan dini, hak atas pendidikan tetap melekat sepanjang anak masih memenuhi kriteria sebagai anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perkawinan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus hak pendidikan. Pemenuhan hak tersebut harus dilihat dari tersedianya pendidikan, akses yang tidak diskriminatif, kualitas pendidikan yang dapat diterima, serta kemampuan sistem pendidikan dalam menyesuaikan dengan kebutuhan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak anak yang memperoleh perlindungan melalui norma hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia. Teori hak memberikan dasar untuk memahami pendidikan sebagai kepentingan hukum anak, sedangkan kerangka 4-A Tomasevski memberikan parameter mengenai bagaimana negara dan pihak yang bertanggung jawab seharusnya merealisasikan hak tersebut. Kedua pendekatan tersebut dalam konteks anak yang melangsungkan perkawinan dini, memperkuat kesimpulan bahwa status perkawinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghilangkan atau mengurangi hak anak atas pendidikan.

3. Hak atas Kesehatan

Hak atas kesehatan adalah hak dasar anak yang penting dan perlu dipenuhi karena menjadi bagian dari pelindungan hukum anak., Anak dianggap sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan semua haknya, termasuk hak kesehatan. Hak atas kesehatan

adalah hak setiap orang untuk menikmati tingkat kesehatan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelen hak merupakan sesuatu yang memperoleh pengakuan dan perlindungan berdasarkan norma hukum dalam suatu hubungan hukum. Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa hak merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan atau memperoleh sesuatu. Riduan Syahrani juga memandang hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan Roscoe Pound menjelaskan bahwa hak merupakan kepentingan yang memperoleh perlindungan hukum. Lili Rasjidi selanjutnya berpendapat bahwa hak timbul sebagai akibat dari kedudukan seseorang sebagai subjek hukum.[30] Berdasarkan pandangan tersebut, hak atas kesehatan dapat dipahami sebagai kepentingan hukum yang dimiliki seseorang sebagai subjek hukum dan memperoleh perlindungan serta pemenuhan berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Pemahaman mengenai hak atas kesehatan juga dapat dilihat dari konsep kesehatan yang dikemukakan oleh World Health Organization (WHO). WHO memandang kesehatan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya keadaan tidak adanya penyakit atau kelemahan. WHO juga menempatkan pencapaian tingkat kesehatan yang

[30] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Bandung: Nusa Media), hlm. 115; Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali), hlm. 119; Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 23; Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, hlm. 55; Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 101.

setinggi-tingginya sebagai salah satu hak fundamental setiap manusia.[31] Konsep tersebut menunjukkan bahwa hak atas kesehatan mempunyai cakupan yang luas karena tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pengobatan ketika seseorang mengalami penyakit, tetapi juga mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang mendukung kehidupan seseorang secara layak.

Sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa, hak atas kesehatan anak memperoleh pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak atas kesehatan anak telah memperoleh pengakuan secara normatif dan menjadi bagian dari hak yang wajib dihormati dan dipenuhi.

Apabila ketentuan tersebut dianalisis menggunakan teori hak, maka hak atas kesehatan merupakan kepentingan hukum yang melekat pada anak sebagai subjek hukum. Pengaturan dalam Pasal 8 menimbulkan konsekuensi bahwa pihak-pihak yang mempunyai kewajiban terhadap anak harus menghormati dan memenuhi kebutuhan kesehatan anak sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, hak atas kesehatan tidak hanya

---

[31] World Health Organization, *Constitution of the World Health Organization*, Preamble, accessed September 7, 2026.

merupakan kebutuhan yang bersifat sosial atau moral, tetapi merupakan hak yang mempunyai dasar hukum dan memperoleh perlindungan dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat yang baik, baik dari jasmani, rohani, dan sosial agar setiap orang mampu hidup berdaya dalam lingkungan sosial serta ekonominya. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan di Indonesia memang tidak secara khusus mengatur tentang pernikahan dini. Terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang ini yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan kewajiban pemerintah dalam memajukan kesehatan masyarakat.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan juga sosial secara keseluruhan bukan hanya bebas dari penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan juga proses reproduksi baik dari pria maupun wanita.[32]

Pengaturan mengenai kesehatan reproduksi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan harus memperhatikan kondisi reproduksi seseorang secara menyeluruh. Kaitannya dengan anak dan remaja, perlindungan kesehatan reproduksi mempunyai arti p enting karena pada masa tersebut seseorang berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental.

---

[32] Ina Noor Inayati, *Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM, dan Kesehatan*, Midwife Journal Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 21.

Oleh sebab itu, pemenuhan informasi, pelayanan, dan perlindungan kesehatan reproduksi merupakan bagian dari upaya memenuhi hak kesehatan secara utuh.

Dasar pemikiran di balik peraturan mengenai usia menikah dalam undang-undang perkawinan lebih fokus pada aspek biologis serta mengabaikan faktor yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) "upaya menjaga kesehatan remaja yang disebutkan pada ayat (1) juga mencakup kesehatan reproduksi remaja dilakukan agar terhindar dari berbagai masalah kesehatan yang dapat menghalangi kemampuan untuk menjalani kehidupan reproduksi secara baik dan sehat". Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kesehatan reproduksi remaja memperoleh perhatian khusus dalam sistem hukum kesehatan.

Pengaturan tersebut memiliki hubungan dengan perlindungan anak karena kesehatan reproduksi merupakan salah satu bagian dari kondisi kesehatan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, perlindungan kesehatan anak tidak dapat dipisahkan dari pemberian informasi, pelayanan, dan perlindungan yang memadai dalam bidang kesehatan reproduksi.

Hak atas kesehatan mempunyai kedudukan yang semakin penting konteks pernikahan dini. Apabila seorang anak melangsungkan perkawinan, perubahan status perkawinan tersebut tidak menghapus kedudukannya sebagai pemegang hak kesehatan apabila yang bersangkutan masih

memenuhi kriteria anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial tetap melekat pada anak sesuai dengan ketentuan hukum.

Keberadaan hak atas Kesehatan dalam teori hak, menimbulkan kewajiban bagi pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak untuk menghormati dan memenuhi kepentingan kesehatan tersebut. Oleh karena itu, status perkawinan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi atau menghilangkan hak anak atas pelayanan kesehatan. Hak tersebut tetap harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

Dengan demikian, hak atas kesehatan dapat dipahami sebagai kepentingan hukum yang melekat pada anak sebagai subjek hukum dan memperoleh pengakuan serta perlindungan melalui peraturan perundang-undangan. Teori hak memberikan dasar untuk memahami bahwa hak kesehatan tidak dapat dihilangkan hanya karena adanya perubahan status perkawinan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar khusus mengenai hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memberikan kerangka umum mengenai hak kesehatan dan kesehatan reproduksi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas kesehatan merupakan salah satu hak fundamental anak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Status perkawinan pada konteks anak

yang melangsungkan pernikahan dini, tidak menghapus hak atas kesehatan sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi kriteria sebagai anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak yang melangsungkan pernikahan dini tetap harus mencakup jaminan terhadap pelayanan kesehatan, kesehatan reproduksi, dan pemenuhan kebutuhan kesehatan fisik, mental, spiritual, serta sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Hak Atas Tumbuh Kembang

Hak anak atas tumbuh dan berkembang merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap anak sejak lahir dan ditegaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan ini menekankan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, bertumbuh, dan berpartisipasi sesuai martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari seluruh bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak tumbuh kembang tidak hanya dimaknai sebagai penambahan usia atau perubahan fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan anak demi mencapai kemajuan optimal dalam segala aspek.[33]

Hak untuk tumbuh dan berkembang dalam teori hak merupakan kepentingan hukum yang melekat pada anak sebagai subjek hukum dan

---

[33] Nabila Zahra Okta Dwiwani, "*Analisis Pengaruh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Mencegah Perkawinan Anak*", Causa: Jurnal Hukum dan Kewrganegaraan Vol. 6, No. 4, hlm. 91-100.

memperoleh pengakuan serta perlindungan melalui peratruan perundang-undangan. Hak tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan perkembangan fisik anak, tetapi juga mencakup kesempatan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, mental, emosional, dan sosialnya. Setiap tindakan atau keadaan yang berkaitan dengan anak harus tetap memperhatikan terpenuhinya kepentingan hukum tersebut. Teori hak menegaskan anak tidak hanya dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi, tetapi juga sebagai pemegang hak yang mempunyai kepentingan hukum untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Secara lebih spesifik hak untuk tumbuh berkembang meliputi beberapa hal. Pertama, anak berhak mendapatkan akses ke layanan medis, tempat tinggal yang layak, dan lingkungan yang bersih agar bisa tumbuh dengan baik. Kedua, aspek mental dan intelektual, yaitu hak anak untuk mendapat pendidikan, stimulasi, dan kesempatan belajar yang cukup untuk mengasah cara berpikir, kreativitas, dan kecerdasan mereka. Ketiga, aspek emosional dan psikologis, yang berarti hak anak untuk menerima kasih sayang, rasa aman, dan pengasuhan yang baik sehingga mereka dapat membentuk karakter yang sehat. Keempat, aspek sosial dan moral, yaitu hak anak untuk berinteraksi, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, serta memperoleh arahan tentang nilai-nilai moral dan keagamaan.

Pada aspek perlindungan hukum, hak untuk tumbuh dan berkembang menuntut negara, orang tua, keluarga, serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak berkembang sesuai

potensi mereka. Negara mempunyai kewajiban menyediakan kebijakan serta sarana pendukung, kebutuhan dasar, sementara masyarakat berkontribusi menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi anak.[34]

Hak untuk tumbuh dan berkembang sering kali terhambat. Anak yang menikah pada usia yang sangat muda sering kali kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, menghadapi risiko kesehatan reproduksi, mengalami tekanan mental, serta harus menanggung urusan rumah tangga sebelum siap secara emosional. Kondisi seperti ini dapat mengganggu perkembangan anak baik secara fisik, mental, maupun sosial. Mencegah pernikahan dini menjadi bagian terpenting dari upaya perlindungan hukum untuk menjamin hak anak agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal sesuia dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.[35] Hak untuk tumbuh dan berkembang tidak semata terkait kondisi kesehatan anak, melainkan juga mencakup kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi seluruh kapasitasnya sejalan dengan fase tumbuh kembangya.

Pertumbuhan terkait aspek fisik, adapun perkembangan meliputi aspek mental, emosional, intelektual, sosial, serta kapasitas dan potensi anak itu sendiri. Pemenuhan hak tumbuh kembang membutuhkan suasana

---

[34] Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, *"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar"*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol, 3, No. 1 (2022), hlm. 120-124.

[35] Alvina Rivini Trulia Mokolensang, Mario A. Gerungan, dan Revy S. Korah, *"Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pernikahan Dini"*, Lex Privatum Vol. 11, No. 5 (2023), hlm. 23-27

yang mendukung agar memperboleh pendidikan, mengasah minat juga bakat, berinteraksi sosial, serta mendapatkan dukungan dari keluarga dan sekitarnya. Mengenai anak yang melangsungkan pernikahan dini, hak mereka untuk bertumbuh dan berkembang masih berlaku selama anak tersebut dianggap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Melangsungkan pernikahan dapat mengubah berbagai aspek kehidupan dan tugas anak, tetapi perubahan tersebut tidak seharusnya menghambat anak dalam menempuh pendidikan, mengasah kemampuan dan bakat, bersosialisasi dengan lingkungan, serta memperoleh bantuan yang dibutuhkan untuk perkembangannya.

Dengan demikian, hak atas kesehatan dan hak untuk tumbuh dan berkembang saling terkait, namun memiliki ruang lingkup yang berbeda. Hak atas kesehatan berfokus pada kondisi dan pelayanan kesehatan, sementara hak untuk tumbuh dan berkembang mencakup aspek fisik, mental, intelektual, emosional, serta sosial anak. Perbedaan ini krusial dalam upaya perlindungan hukum bagi anak yang melakukan pernikahan dini.

5. **Pernikahan Dini**

Pernikahan dini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang ketika belum mencapai usia yang dianggap memadai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian mengenai perkawinan anak, istilah pernikahan dini sering dikaitkan dengan perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun. Sementara itu, dalam hukum nasional, penentuan

apakah seseorang dapat melangsungkan perkawinan harus mengacu pada batas usia yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara umum, pernikahan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan keluarga. Pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut pada pokoknya menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Setelah adanya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum perkawinan bagi pria dan wanita ditetapkan sama, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pernikahan dini dipahami sebagai perkawinan yang dilangsungkan sebelum terpenuhinya batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan tetap memperhatikan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Ketentuan mengenai batas usia tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melalui perubahan tersebut, Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Dengan demikian, batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi sama, yaitu 19 tahun.

Penetapan batas usia minimum tersebut memberikan ukuran hukum yang lebih jelas mengenai usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, istilah pernikahan dini dalam penelitian ini perlu dipahami dengan mengacu pada batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh hukum nasional. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia 19 tahun pada dasarnya berada di bawah batas usia minimum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga untuk dapat dilangsungkan harus memenuhi mekanisme pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai dispensasi kawin.

Perubahan batas usia tersebut juga memiliki kaitan dengan upaya perlindungan anak. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menerangkan bahwa penyamaan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun berkaitan dengan pertimbangan kematangan jiwa dan raga calon mempelai serta upaya memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan dan tumbuh kembang. Dengan demikian, perubahan batas usia perkawinan tidak hanya berkaitan dengan persyaratan formal untuk melangsungkan perkawinan, tetapi juga mempunyai dimensi perlindungan terhadap hak anak.

Konteks penelitian ini, pernikahan dini perlu dibedakan dari sekadar pengertian "menikah pada usia muda". Secara hukum, istilah tersebut berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan sebelum terpenuhinya batas usia minimum sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ukuran usia menjadi unsur penting dalam menentukan apakah suatu perkawinan dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang telah ditentukan hukum.

Pemahaman mengenai pernikahan dini juga perlu dikaitkan dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan tersebut memberikan batas usia yang digunakan untuk menentukan kedudukan seseorang sebagai anak dalam perspektif hukum perlindungan anak.

Ketentuan tersebut terdapat perbedaan antara batas usia anak dan batas usia minimum perkawinan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menggunakan usia 18 tahun sebagai batas untuk menentukan seseorang sebagai anak, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia 19 tahun sebagai batas minimum untuk melangsungkan perkawinan. Kedua ketentuan tersebut memiliki fungsi hukum yang berbeda sehingga tidak dapat dipersamakan.

Perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi hukum. Seseorang yang belum berusia 18 tahun masih berkedudukan sebagai anak menurut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan pada saat yang sama belum memenuhi batas usia minimum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila orang tersebut melangsungkan perkawinan berdasarkan dispensasi pengadilan, kedudukannya sebagai anak menurut ketentuan perlindungan anak tetap harus diperhatikan sesuai dengan batas usia yang ditentukan oleh undang-undang.

Selain itu, seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun tetapi belum mencapai usia 19 tahun tidak lagi termasuk kategori anak berdasarkan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tetapi tetap belum memenuhi batas usia minimum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa status sebagai anak dan persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Melalui perkawinan dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya merupakan hubungan pribadi antara kedua pihak, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri serta hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pernikahan dini perlu ditempatkan dalam kerangka hukum perkawinan, khususnya yang

berkaitan dengan batas usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan.[36]

Hukum Indonesia, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai batas usia perkawinan selanjutnya diatur dalam Pasal 7. Setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum perkawinan bagi pria dan wanita ditetapkan sama, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Konteks hukum nasional, pernikahan dini dapat dipahami sebagai perkawinan yang dilangsungkan sebelum terpenuhinya batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Oleh karena itu, konsep pernikahan dini perlu dibedakan antara batas usia anak dan batas usia minimum perkawinan. Perkawinan yang dilakukan terhadap seseorang yang belum berusia 18 tahun berkaitan langsung dengan persoalan perkawinan anak, sedangkan perkawinan sebelum usia 19 tahun merupakan perkawinan yang berada di bawah batas minimum menurut

[36] Muhammad Yuslih, "Eksistensi *Awik-Awik* sebagai Legalitas Praktik Pernikahan Dini di Pulau Lombok," *Mu'addah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 11, no. 2 (2023), hlm. 139.

hukum perkawinan dan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme dispensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah pernikahan dini dalam penelitian ini tidak hanya dipahami dari aspek usia secara sosial, tetapi juga dari perspektif hukum. Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilangsungkan sebelum terpenuhinya batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila perkawinan tersebut melibatkan seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun, maka selain tunduk pada ketentuan hukum perkawinan, kedudukannya juga harus dilihat berdasarkan ketentuan mengenai perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga memberikan mekanisme dispensasi bagi perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia 19 tahun. Pasal 7 ayat (2) menentukan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah usia 19 tahun bukan merupakan keadaan yang berlaku secara umum, melainkan pengecualian yang harus melalui mekanisme hukum.

Keberadaan dispensasi tidak mengubah batas usia minimum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi hanya memberikan pengecualian dalam keadaan tertentu melalui keputusan pengadilan. Hal tersebut penting dalam memahami pernikahan dini karena

perkawinan yang dilakukan melalui dispensasi tetap merupakan perkawinan yang dilangsungkan sebelum batas usia minimum yang ditentukan oleh hukum, tetapi memperoleh izin berdasarkan mekanisme pengecualian yang telah disediakan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menentukan bahwa dalam memberikan dispensasi, pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa calon mempelai harus ditempatkan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam proses dispensasi. Hal ini menjadi semakin penting ketika calon mempelai yang dimohonkan dispensasi masih berada pada kategori anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pengaturan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi dan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu asas yang harus diperhatikan. Selain itu, hakim harus memperhatikan hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[37]

---

[37] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 2 dan 16, hlm. 6-12.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian pernikahan dini dalam penelitian ini memiliki keterkaitan langsung dengan pengaturan batas usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan dasar hukum perkawinan di Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan batas usia anak pada usia di bawah 18 tahun. Perbedaan tersebut menjadi penting untuk menentukan kedudukan hukum anak yang melangsungkan perkawinan dan menjadi dasar dalam menganalisis perlindungan hukumnya.

Istilah pernikahan dini merupakan frasa yang umum digunakan dalam penelitian mengenai perkawinan anak guna menjelaskan perkawinan yang berlangsung di usia yang masih dikategorikan sebagai anak. Istilah ini tidak mempunyai definisi yang pasti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari sudut pandang hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, penetapan status anak mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, meliputi anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, mengenai batasan umur untuk menikah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seseorang hanya diperbolehkan menikah jika pria dan wanita sudah berusia 19 tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam penelitian ini frasa pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang terjadi sebelum mencapai usia minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan tetap mempertimbangkan status anak sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan anak-anak yang melakukan pernikahan dan masih dalam kategori usia menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada peninjauan norma hukum terkait isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian hukum normatif menekankan analisis hukum dan norma yang terkait dengan isu hukum serta menggunakan sumber hukum sebagai landasan untuk melakukan analisis. [38] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang yang sesuai sehingga isu hukum dapat dianalisis berdasarkan norma serta hukum yang berlaku.[39]

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif. [40] Pendekatan hukum normatif merupakan suatu metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum yang ada di dalam undang-undang, keputusan pengadilan, pandangan para ahli, serta literatur lainnya sebagai sumber utama penelitian. Pendekatan ini melihat hukum sebagai peraturan atau norma yang mengatur tindakan manusia dalam masyarakat *(law*

---

[38] Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum", *Smart Law Journal* 2, No. 2 (2023), hlm. 115-117.

[39] *Ibid*, hlm 118-119.

[40] Alfan maulana, Titi Atiyatul Alawiyah, dan Firman Adi Candra, *"Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-undangan"*, Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner (2025), hlm. 1-3.

in books), sehingga perhatian kajiannya terarah pada sistem, sinkronisasi, prinsip, dan konsep hukum yang berkaitan dengan maslaah yang diteliti.[41]

Pendekatan hukum normatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum sekunder, dan tersier (sebagai data sekunder) yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melangsungkan pernikahan dini perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian dilakukan secara umum dari ilmu hukum perdata, khususnya hukum perlindungan anak dan hukum perkawinan, yang tentunya berkaitan dengan masalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan juga hak atas tumbuh kembang pada anak yang telah melangsungkan pernikahan dini.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yang digunakan dalam penelitian adalah merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta yang terjadi sebagaimana adanya. Analitis yaitu dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.[42] Dengan menerapkan ketentuan prinsip-prinsip perlindungan

---

[41] Bintang Adi Putra dkk., *"Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis"*, Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner (2025), hlm. 1-3.

[42] Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.* (Jakarta : Badan Penerbit Fakuktas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.4.

anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan penelitian ini dapat mengetahui dasar perlindungan hukum bagi anak yang melangsungkan pernikahan dini, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak anak terkait pendidikan, kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak hukum dari praktik pernikahan dini terhadap pemenuhan hak-hak anak seagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan peneliti. [43] Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Adapun metode pengumpulan data melalui; studi pustaka *(library research)* dan Perundang-undangan *(statute approach)*. Sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Pada bahan hukum sekunder ini penulis memperolehnya melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan

[43] Notoadmojo, *Metodologi Penelitian.* (Jakarta : Jakarta Rineka Cipta, 2011), hlm. 90.

menganalisis literatur-literatur yang ada kaitannya dengan anak yang melangsungkan pernikahan dini yang berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak yang telah melangsungkan pernikahan dini. Bahan hukum primer yang paling utama yang digunakan dalam menyusun penelitian ini antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang

mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah.[44] Adapun bahan hukum sekunder meliputi: buku hukum serta buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk kepenulisan ini, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk proposal, situs hukum serta situs ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk penulisan proposal.

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.[45]

D. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Sesudah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data

---

[44] *Ibid*, hlm. 13.
[45] *Ibid*, hlm. 14.

yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Asas Perlindungan Anak yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah subjek hukum yang posisi dan haknya wajib dihormati, dilindungi, dan juga dipenuhi. Definisi anak menurut hukum di Indonesia tidak selalu diterapkan secara konsisten, sebab setiap peraturan memiliki batasan aturan tersendiri. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai anak perlu disesuaikan berdasarkan konteks hukum yang digunakan dalam sebuah penelitian.

Definisi anak dalam konteks hukum di Indonesia tidak dirumuskan dengan cara yang konsisten dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Perbedaan ini muncul karena ada perbedaan dalam cakupan dan tujuan dari setiap aturan. Veren Towua menunjukkan bahwa batasan usia untuk anak dalam berbagai peraturan dapat berbeda, namun baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa usia 18 tahun sebagai penanda utama untuk menentukan seseorang yang belum mencapai 18 tahun tetap dianggap anak, tanpa memperhatikan status perkawinan mereka.[46]

[46] Veren Towua, "Kajian Hukum terhadap Anak Dibawah Umur yang Berhadapan dengan Hukum", Lex Crimen 10, No. 12 (2021), hlm. 156-157.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, definisi anak terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Ketetentuan ini menjadi landasan utama dalam penelitian ini karena fokus penelitian ditujukkan pada perlindungan hukum terhadap anak. Batas usia 18 tahun digunakan sebagai patokan hukum untuk menentukan status seseorang sebagai anak dalam kerangka hukum perlindungan anak.

Pemahaman ini juga dijelaskan oleh Icha Cahyaning Fitri yang menyatakan bahwa secara kaidah, anak merupakan individu yang belum mencapai usia dewasa serta berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dikategorikan sebagai individu yang usianya di bawah 18 tahun, meliputi pula yang masih berada dalam kandungan. Fitri selanjutnya menghubungkan batas usia tersebut dengan persoalan pernikahan dini, dengan menekankan bahwa seorang perempuan yang berumur 16 tahun masih masuk dalam kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.[47] Hal ini menunjukkan bahwa definisi usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perlu diperhatikan ketika membahas individu yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang menetukan batas usia minimum untuk meninjau status kedudukan anak. Perbedaan ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

---

[47] Icha Cahyaning Fitri, "Identifikasi Hak Asasi Anak Perempuan Usia 16 Tahun dalam Membentuk Keluarga di Kabupaten Bondowoso," Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 14, No. 2 (2016), hlm. 129 dan 138.

Tabel 4.1 Perbandingan Pengaturan Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

NO	Peraturan Perundang-Undangan	Pengaturan	Batas Usia
1.	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	Belum 18 Tahun.
2.	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.	Di bawah 18 tahun dan belum menikah.
3.	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, anak adalah yang terlah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Anak korban dan anak saksi pada prinsipnya adalah anak yang belum berusia 18 tahun.	Berusia 12– belum 18 tahun untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum; belum 18 tahun untuk

			Anak Korban dan Anak Saksi
4.	UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019	Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.	Minimal 19 tahun untuk perkawinan.

Tabel ini menunjukkan bahwa pengertian anak tidak dapat disamakan dengan batas usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan seseorang sebagai anak jika usianya di bawah 18 tahun, sementara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum untuk pernikahan adalah 19 tahun. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa usia 19 tahun merupakan batas yang sesuai untuk mengizinkan pernikahan, bukan tolak ukur untuk menentukan apakah individu masih berada di bawah perlindungan hukum anak. Mengenai perbedaan ini juga telah di bahas oleh Tania Ariska Putri dan Umar Haris Sanjaya dalam studi mengenai kesenjangan pengaturan usia perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 serta Perlindungan Anak sesuai UU No. 35 Tahun 2014.[48]

Perbedaan antara status anak dan batas usia perkawinan menjadi sangat penting ketika individu masih di bawah 18 tahun melakukan perkawinan. Menurut Towua, hukum yang mengatur perlindungan anak menetapkan batas

[48] Tania Ariska Putri dan Umar Haris Sanjaya, "Pemaknaan Disparitas Perkawinan pada Usia Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Literasi Hukum* 7, no. 1 (2023), hlm. 3.

usia sebagai kriteria untuk mendefinisikan anak dan tidak menggunakan status perkawinan sebagai tolak ukur untuk menghapus status seseorang sebagai anak. Individu yang belum berusia 18 tahun masih dianggap sebagai anak meskipun telah melakukan perkawinan.

Anak memiliki status ebagai subjek hukum, artinya mereka mempunyai hak yang harus dijaga bahkan setelah menikah. Ibrahim memandang anak sebagai pemilik hak keperdataan yang berharga dan bermartabat, serta berhak bebas dari ancaman dan perlakuan yang membahayakan. Dalam kasus pernikahan dini, prinsip ini menekankan bahwa perubahan status pernikahan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan hak anak yang sudah dijamin undang-undang.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvina Rivini Trulia Mokolensang, Mario A. Gerungan, dan Revy S. Korah, yang fokus pada isu hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 terkait dengan pernikahan di usia muda. Penelitian ini menemukan bahwa masalah pernikahan usia dini tidak sekadar terkait batasan umur untuk menikah, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak anak dan asas perlindungan anak. Dengan demikian, penentuan status seseorang sebagai anak menjadi penting dalam mengkaji perlindungan hukum bagi hak-hak tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa individu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yeng berumur di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kriteria ini menjadi panduan dalam

menentukan status seseorang sebagai anak dalam konteks perlindungan hukum. Status perkawinan tidak secara otomatis menghapus status isi selama usia individu tersebut masih di bawah 18 tahun. Sementara itu, usia 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah batas usia minimal untuk melakukan pernikahan dan memiliki fungsi hukum yang berbeda dibandingkan dengan batas usia anak. Oleh karena itu, dalam penelitian tentang perlindungan hukum bagi anak yang melangsungkan pernikahan dini, status seseorang sebagai anak ditetapkan berdasarkan ketentuan perlindungan anak, bukan hanya berdasarkan status perkawinannya.

Asas perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menempatkan prinsip perlindungan anak sebagai landasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menjamin pemenuhan hak anak serta menjadi dasar bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya berasal dari prinsip umum perlindungan anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.[49]

[49] Rifki Septiawan Ibrahim, HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, Lex Privatum, hlm. 54.

Prinsip-prinsip ini juga ada dalam peraturan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Upaya perlindungan dan kesejahteraan anak telah memperoleh dasar hukum sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pengaturan tersebut kemudian berkembang melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.[50]

Prinsip-prinsip perlindungan anak pada dasarnya telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar perlindungan anak. Asas tersebut menjadi pedoman dan menjamin terpenuhinya hak anak dan menjadi dasar bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab perlindungan terhadap anak.

Mengenai kajian perlindungan anak, terdapat empat prinsip utama yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan

[50] *Ibid*, hlm. 54.

terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat asas menjadi dasar yang harus diperhatikan dalam setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak.[51]

1. **Asas Non-Diskriminasi**

Asas non-diskriminasi merupakan asas yang menghendaki agar setiap anak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak tanpa adanya perlakuan yang membedakan secara tidak sah. Setiap anak mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus diberikan tanpa membeda-bedakan anak berdasarkan keadaan atau latar belakang tertentu.[52]

Asas non-diskriminasi berkaitan dengan prinsip persamaan dalam pemenuhan hak anak. Perlindungan terhadap anak harus diberikan secara adil sehingga setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hak-haknya. Pembedaan perlakuan terhadap anak tidak dapat dibenarkan apabila pembedaan tersebut menyebabkan kekurangan hak atau perlindungan yang seharusnya diperoleh anak.

Penyamaan usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan juga mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan di dalam hukum pernikahan. Sebelum pembaruan tersebut, terdapat perbedaan

---

[51] Alvina Rivini Trulia Mokolensang, dkk., Op. Cit., hlm. 4.

[52] Nikyta Legoh, "Pelecehan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Lex Crimen* 7, no. 4 (2018), hlm. 49.

dalam usia minimum antara laki-laki dan perempuan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kedua belah pihak sekarang memiliki usia minimum yang sama, yaitu 19 tahun. Ketentuan itu menghapus perbedaan usia yang didasarkan pada jenis kelamin dan memberikan ukuran yang setara dalam memenuhi syarat usia untuk menikah.

Kaitannya dengan anak yang melangsungkan pernikahan dini, asas non-diskriminasi mempunyai arti bahwa status perkawinan tidak seharusnya menjadi dasar untuk menghilangkan atau mengurangi hak anak. Apabila seseorang masih termasuk dalam kategori anak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka haknya atas pendidikan, kesehatan, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tetap harus dihormati. Dengan demikian, status perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan perlakuan yang lebih rendah terhadap pemenuhan hak anak.

Berdasarkan asas non-diskriminasi, anak yang telah menikah tetap berkedudukan sebagai anak sepanjang usianya belum mencapai 18 tahun. Status perkawinan tidak boleh menjadi dasar untuk membedakan pemenuhan haknya dengan anak yang belum menikah. Dengan demikian, anak tetap berhak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan dasar yang menghendaki agar setiap tindakan, kebijakan, maupun keputusan yang berkaitan dengan anak menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip *best interest of the child* menghendaki agar kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara maupun pihak lain yang berkaitan dengan kehidupan anak.[53]

Penjelasan umum tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa penyesuaian batas usia untuk menikah dilaksanakan dengan alasan bahwa pernikahan di usia yang lebih matang diharapkan dapat memberikan kedewasaan emosional dan fisik bagi calom mempelai. Perubahan ini juga terkait dengan upaya untuk menghindari pernikahan di usia dini dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikan serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya dilihat dari keadaan anak pada saat suatu tindakan dilakukan, tetapi juga dari akibat tindakan tersebut terhadap kehidupan dan perkembangan anak pada masa yang akan datang.

---

[53] Ahmad Zaki dan Suci Ramadhona, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengadilan Agama Binjai)," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025), hlm. 317-355.

Penerapan asas ini memerlukan pertimbangan yang menyeluruh terhadap kondisi, kebutuhan, hak, keselamatan, dan perkembangan anak.

Asas ini juga menunjukkan bahwa kepentingan anak tidak dapat dikesampingkan hanya karena terdapat kepentingan orang tua, keluarga, masyarakat, ataupun pihak lainnya. Setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan anak sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingannya sendiri.

Asas kepentingan terbaik bagi anak ini mempunyai kedudukan penting karena perkawinan merupakan keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan anak dalam jangka panjang. Keputusan mengenai perkawinan anak tidak seharusnya hanya didasarkan pada kepentingan keluarga atau alasan sosial tertentu, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan anak sebagai pihak yang akan menjalani kehidupan perkawinan tersebut.

Selain menetapkan batas usia minimum perkawinan, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur kemungkinan pemberian dispensasi perkawinan oleh pengadilan berdasarkan alasan yang mendesak dan diserttai bukti yang memadai. Dalam pemberian dispensasi tersebut, kepentingan terbaik bagi anak perlu tetap diperhatikan dengan mempertimbangkan aspek pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, serta tumbuh kembang anak. Dispensasi merupakan bentuk pengecualian terhadap batas minimum usia perkawinan yang dapat diberikan oleh pengadilan dalam kondisi tertetnu. Sebagai sesuatu

pengecualian, pemberiannya perlu dilakukan secara cermat dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin terpenuhi hak-haknya.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga memberikan panduan mengenai hal-hal yang wajib diperhatikan oleh hakim saat memeriksa pengajuan dispensasi. Hakim mengamati latar belakang dan alasan di balik pernikahan anak, persetujuan dari anak tersebut, selisih usia antara anak dan calon pasangan, serta kondisi psikologis, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi anak. Hakim mempertimbangkan adanya unsur paksaan atau tidak dan memastikan kesanggupan orang tua untuk menanggung urusan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dispensasi menikah tidak hanya berkaitan dengan undang-unang perkawinan, melainkan juga mencakup perlindungan anak. Semakin kuat aspek perlindungan anak selama proses dispensasi berlangsung, semakin sesuai pula penerapan dispensasi dengan tujuan dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

3. Asas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Tumbuh Kembang

Asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang merupakan asas yang menjamin bahwa setiap anak memperoleh kesempatan untuk menjalani kehidupan dan berkembang secara optimal. Perlindungan terhadap hak hidup dan kelangsungan hidup tidak hanya berkaitan dengan mempertahankan keberadaan fisik anak, tetapi juga mencakup penciptaan kondisi yang memungkinkan anak berkembang

secara optimal. Tumbuh kembang anak meliputi perkembangan fisik, mental, intelektual, emosional, dan sosial.[54]

Asas ini menjadi dasar untuk menilai apakah hak-hak dasar anak tetap dapat dipenuhi setelah perkawinan. Anak yang melangsungkan perkawinan tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pengasuhan, serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan fisik dan mentalnya apabila masih memenuhi kriteria sebagai anak.

Perlu dibedakan antara batas usia minimum perkawinan dan usia anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan batas usia minimum perkawinan 19 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua aturan mempunyai objek pengaturan yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur kedudukan dan perlindungan seseorang sebagai anak.

Perkawinan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan hak anak atas kehidupan dan perkembangan. Perlindungan harus tetap diberikan agar perubahan keadaan yang dialami anak tidak menghilangkan kesempatan untuk menjalani proses tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, hak tumbuh dan berkembang memiliki ruang

[54] Alvina Rivini Trulia Mokolensang, dkk., Op. Cit., hlm. 144.

lingkup yang lebih luas daripada hak kesehatan, karena tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga mencakup perkembangan mental, intelektual, emosional, dan sosial anak.

4. Asas Penghargaan terhadap Anak

Asas penghargaan terhadap pandangan anak merupakan asas yang memberikan pengakuan terhadap hak anak untuk menyampaikan pendapat mengenai persoalan yang menyangkut dirinya sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang pandangannya perlu didengar dan dipertimbangkan dalam tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.[55]

Pasal 7 ayat (3), pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak atau calon mempelai tidak semata-mata diposisikan sebagai objek keputusan orang tua. Pendapat calon mempelai menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Penghargaan terhadap pandangan anak bukan berarti setiap keinginan anak harus selalu dipenuhi, melainkan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatannya serta memastikan bahwa pendapat tersebut dipertimbangkan secara layak. Tingkat usia dan

[55] Nikyta Legoh, "Pelecehan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Lex Crimen* 7, no. 4 (2018), hlm. 50.

kematangan anak menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai pendapat yang disampaikan.

Asas penghargaan terhadap pandangan anak mempunyai arti penting karena keputusan perkawinan memberikan pengaruh langsung terhadap kehidupan anak. Anak perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai perkawinan yang akan atau telah dijalani. Pendapat tersebut perlu dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak.

Anak tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima akibat dari suatu keputusan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam persoalan yang menyangkut dirinya. Hal tersebut merupakan bagian dari pengakuan terhadap kedudukan anak sebagai subjek hukum.

Keempat asas tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Asas non-diskriminasi memberikan jaminan bahwa setiap anak memperoleh perlakuan dan pemenuhan hak secara setara. Asas kepentingan terbaik bagi anak memastikan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh berkembang secara optimal. Sementara itu, asas penghargaan terhadap pandangan anak menjamin kesempatan bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Keempat prinsip tersebut juga

ditegaskan dalam kajian hukum mengenai perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Keempat prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah ketentuan dan tindakan yang berkaitan dengan perkawinan telah memberikan perlindungan yang sesuai dengan hak anak. Perlindungan tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan ketentuan hukum, tetapi juga dari sejauh mana anak memperoleh perlakuan yang tidak diskriminatif, kepentingan terbaiknya menjadi pertimbangan, hak hidup dan tumbuh kembangnya tetap terjamin, serta pandangannya dihargai.

Keempat asas tersebut menjadi dasar untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak yang melangsungkan pernikahan dini. Anak yang telah menikah tetap termasuk dalam kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 selama usianya belum mencapai 18 tahun. Dengan demikian, perkawinan tidak menghapus hak anak atas perlindungan hukum, termasuk hak memperoleh pendidikan, kesehatan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.

B. Hak Anak atas Pendidikan, Kesehatan, dan Tumbuh Kembang bagi anak yang melaksanakan Pernikahan Dini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak anak adalah bagian yang sangat penting dalam usaha memastikan perlindungan anak. Anak dianggap sebagai subjek hukum yang berhak dihargai, dilindungi, dan dipenuhi demi menikmati kehidupan serta menjalankan tumbuh

kembang secara optimal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum terkait status dan pemenuhan hak anak. Penelitian ini berfokus utama pembahasan adalah hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta tumbuh dan berkembang, ketiga hak tersebut memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan anak yang terlibat pernikahan dini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Kedudukan ini menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan mendapat perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Status perkawinan tidak secara otomatis menghapus hak individu yang masih memenuhi kriteria sebagai anak menurut ketentuan hukum. Hal ini menjadi dasar untuk menganalisis pemenuhan hak anak yang terikat dalam pernikahan dini.

1. Hak Anak atas Pendidikan

Pendidikan adalah hak mendasar anak yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kemampuan anak. Melalui proses pendidikan, anak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, kepandaian, keahlian, dan potensi yang ada pada dirinya. Memastikan hak pendidikan terpenuhi adalah bagian dari tugas perlindungan anak.

Secara normatif, hak anak untuk mendapatkan pendidikan ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak menerima pendidikan dan

pengajaran untuk pengembangan karakter dan kecerdasannya, sesuai dengan minat serta bakat. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak yang melekat pada anak dan harus diberikan dengan memperhatikan kebutuhan serta potensi masing-masing anak.

Hak atas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya lembaga pendidikan, melainkan juga kesempatan anak untuk menerima pembelajaran yang memadai. Terkait pemenuhan hak pendidikan yang dilindungi konstitusi, pendidikan diakui sebagai hak yang seharusnya dapat dirasakan setiap orang, dan tanggung jawab untuk memenuhinya menjadi kewajiban negara.[56] Hak anak atas pendidikan harus dianggap sebagai hak berlandaskan hukum yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

Pemenuhan hak atas pendidikan menjadi isu yang sangat penting karena pernikahan dapat menyebabkan perubahan dalam tanggung jawab dan keadaan hidup anak. Penelitian yang dilakukan oleh Sonny Dewi Judiasih, dkk secara khusus mengkaji penerapan hak pendidikan bagi anak perempuan yang menikah di bawah umur. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa masalah pernikahan dini berkaitan erat dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak.[57]

Perkawinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan atau mengurangi kesempatan belajar bagi anak. Anak yang sudah menikah masih memiliki hak san untuk mendapatkan Pendidikan sesuai dengan

---

[56]Arpat Rasyid, "Pendidikan sebagai Hak Konstitusional: Telaah Yuridis terhadap Kebijakan Pendidikan Dasar," *Publikasi Pendidikan* 15, no. 3 (2025), hlm. 1279–1284.

[57] Sonny Dewi Judiasih,dkk., Op. Cit., hlm. 101–102.

aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pentingnya untuk terus memperhatikan pemenuhan hak belajar meskipun anak sudah menjadi suami atau istri.

Penelitian tentang perkawinan dini yang mempwerlihatkan bahwa menikah pada usia anak dapat memengaruhi kesempatan untuk memperoleh hak Pendidikan. Yudianingsih, dkk menilai Pendidikan sebagai salah satu haka nak yang terpengaruh oleh fenomena pernikahan dini[58] Situasi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum untuk anak yang telah melangsungkan pernikahan dini tidak hanya berfokus pada sah atau tidaknya perkawinan, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan Pendidikan bagi anak.

Hak anak atas pendidikan dalam kajian ini dipahami sebagai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kecerdasan sesuai dengan minat serta bakat. Bagi anak yang mengalami pernikahan dini, hak itu tetap ada selama anak tersebut masih dianggap sebagai anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Menikah tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapus hak tersebut.

2. Hak Anak atas Pendidikan

Selain pendidikan, kesehatan merupakan hak dasar yang begitu penting untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Kondisi

[58] Dina Kurnita Yudianingsih, Husnul Chotimah, Kartika Rida Putri, dan Ridya Islamirza, "Problematika Pernikahan Dini dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 6, no. 1 (2022), hlm. 1–16.

kesehatan yang baik memungkinkan anak untuk melalui masa tumbuh kembang secara maksimal. Jaminan kesehatan untuk anak adalah bagian dari pemenuhan hak yang harus dijaga oleh hukum.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan setiap anak untuk memperoleh layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak kesehatan anak mencakup berbagai aspek karena tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga meliputi kesehatan mental, spiritual, dan sosial.

Kerangka hukum kesehatan yang berlaku kini, aspek kesehatan juga tercakup dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan ini menetapkan secara umum hal-hal mengenai kesehatan bagi bayi, anak, dan remaja yang juga meliputi aspek kesehatan reproduksi dan kesehatan jiwa. Pengaturan semacam ini menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan bagi anak dan remaja perlu dilakukan dengan memperhatikan tahapan pertumbuhan serta kebutuhan kesehatan untuk tiap kelompok usia.

Hak atas kesehatan sangat terkait dengan praktik pernikahan dini karena perkawinan di usia dini dapat memengaruhi masalah kesehatan reproduksi. Penelitian yang dilakukan oleh Aisya Amalia Nst dkk mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi mengungkapkan bahwa pernikahan dini berhubungan dengan ketidakmatangan sistem

reproduksi serta masalah kesehatan reproduksi.[59] Jika seorang anak menjalani pernikahan, penting bagi perlindungan kesehatan mereka untuk tetap diperhatikan sesuai dengan umur dan keadaan mereka.

Status perkawinan dalam konteks perlindungan anak, tidak menghapuskan hak untuk memperoleh layanan kesehatan. Apabila anak itu masih tergolong sebagai anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka hak atas layanan kesehatan dan perlindungan sosial tetap melekat padanya. Pemenuhan hak ini mencakup perhatian pada kebutuhan kesehatan fisik, mental, serta kebutuhan kesehatan reproduksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hak anak untuk mendapatkan layanan kesehatan adalah hak yang harus dihargai dan dipenuhi saat anak menjalani pernikahan dini. Pernikahan tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi akses anak terhadap layanan kesehatan. Perlindungan ini sangat penting agar perubahan situasi yang disebabkan oleh pernikahan tidak menghalangi pemenuhan kebutuhan kesehatan anak.

3. Hak Anak atas Tumbuh dan Berkembang

Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang adalah hak utama yang dipunyai setiap anak. Hak tersebut mencakup tidak hanya pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan mental, intelektual, emosional, serta sosial anak. Pelaksanaan hak untuk tumbuh dan berkembang, diperlukan situasi yang

---

[59] Aisyah Amalia Nst, Aknes Dini, Arisah Fasion, Tri Sunarsih, dan Dechoni Rahmawati, "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi: Literature Review," *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda* 9, no. 2 (2023): 126–127.

memungkinkan anak memperoleh pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan lingkungan yang mendukung.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan nilai harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa proses tumbuh kembang merupakan hak yang dijamin secara langsung dalam kerangka perlindungan anak.

Hak tumbuh dan berkembang memiliki hubungan dengan pemenuhan hak-hak anak lainnya. Pendidikan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan intelektual, sedangkan kesehatan mendukung pertumbuhan fisik dan mental. Dengan demikian, pemenuhan pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang mendukung terlaksananya hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

Komang Krisna Prema dkk, mengkaji secara mendalam tentang pemenuhan hak anak untuk tumbuh berkembang dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kajian ini menganggap pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebagai unsur utama dalam pelaksanaan perlindungan anak.[60]

Hak untuk tumbuh dan berkembang yang berkaitan dengan pernikahan dini harus diperhatikan karena perkawinan dapat menimbulkan perubahan dalam tanggung jawab yang mesti dijalani oleh anak. Apabila

[60] Komang Krisna Prema, dkk., Op. Cit., hlm.120–124.

perubahan tersebut berakibat anak tidak bisa memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, atau kesempatan untuk mengembangkan bakatnya, maka kondisi ini patut dianalisis dari perspektif pemenuhan hak-hak anak.

Perbedaan antara usia anak dan usia minimum untuk menikah juga penting dalam pembahasan ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan pernikahan hanya boleh jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Kedua aturan ini mempunyai kegunaan hukum yang berbeda. Usia 18 tahun menentukan status seseorang sebagai anak, sedangkan 19 tahun adalah batas minimum untuk menikah.

Seseorang yang masih di bawah usia 18 tahun telah melangsungkan pernikahan melalui dispensasi, statusnya sebagai anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus tetap diperhatikan. Status pernikahan ini tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menghilangkan hak anak atas kehidupan, tumbuh kembang, pendidikan, dan kesehatan.

Hak untuk tumbuh dan berkembang adalah hak yang selalu menjadi bagian dari anak yang melakukan pernikahan dini selama masih tergolong anak-anak. Perlindungan terhadap hak ini perlu diarahkan agar anak tetap mendapatkan peluang untuk berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya.

4. Keterkaitan Hak Pendidikan, Kesehatan, dan Tumbuh Kembang dengan Praktik Pernikahan Dini

Hak atas pendidikan, kesehatan, dan mendapatkan kesempatan tumbuh kembang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketiganya saling terkait erat, pendidikan menunjang proses tumbuh kembang anak, kesehatan berperan penting bagi kelangsungan hidup serta pertumbuhan fisik dan mental, sedangkan hak untuk tumbuh dan berkembang meliputi seluruh tahapan perkembangan anak.

Kaitannya dengan praktik pernikahan dini, pemenuhan ketiga hak tersebut tetap merupakan bagian penting dari perlindungan hukum bagi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada dasarnya tidak membedakan pemenuhan hak anak berdasarkan status perkawinannya. Sepanjang seseorang masih memenuhi kriteria sebagai anak, hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan tetap melekat dan wajib dihormati serta dipenuhi.

Hal tersebut sejalan dengan kajian Mokolensang dkk. yang membahas pemenuhan hak anak dalam kaitannya dengan pernikahan dini. Kajian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan pada usia dini tetap berkaitan dengan kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, serta hak untuk hidup dan berkembang.[61]Berlangsungnya perkawinan pada usia dini tidak serta-merta

[61] Alvina Rivini Trulia Mokolensang, dkk., Op. Cit., hlm. 153–154.

menghilangkan kedudukan anak sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan.

Anak yang sudah menikah dalam bidang pendidikan, tetap berhak mendapatkan pendidikan. Melalui bidang kesehatan, anak tetap berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik dan mentalnya. Sementara itu, dalam konteks tumbuh dan berkembang, anak tetap perlu diberi kesempatan untuk melatih kemampuan dan mengeksplorasi potensinya. Ketiga hak tersebut harus dipenuhi sekaligus karena satu hak bisa membantu memenuhi hak yang lainnya.

Menurut sudut pandang hukum perlindungan anak, memenuhi hak tersebut adalah tugas pihak yang memiliki kewajiban terhadap anak. Perubahan status pernikahan tidak bisa jadi alasan untuk memindahkan atau menghilangkan kewajiban melindungi anak. Anak yang menikah dini tetap memerlukan perlindungan agar hak-haknya bisa terpenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta tumbuh dan berkembang tetap berlaku bagi anak yang melakukan pernikahan dini, selama anak tersebut masih memenuhi kriteria anak sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Praktik pernikahan dini tidak menghilangkan hak anak sebagai individu yang memiliki hak. Perlindungan hukum harus tetap diarahkan untuk memenuhi tiga hak tersebut agar kepentingan anak tetap terlindungi dan proses pertumbuhan serta perkembangannya berjalan secara optimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, atas rumusan masalah yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Asas perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Keempat asas tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Kaitannya dengan pernikahan dini, penerapan asas-asas tersebut mengharuskan setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak tetap memperhatikan kesetaraan, kepentingan terbaik, keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta pandangan anak.

Anak yang melangsungkan pernikahan dini tetap memiliki hak atas pendidikan, kesehatan, serta tumbuh dan berkembang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak atas pendidikan tetap harus dipenuhi tanpa menjadikan status perkawinan sebagai alasan untuk menghambat kesempatan anak memperoleh pendidikan dan

pengajaran, sedangkan hak atas kesehatan tetap mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial sesuai dengan kondisi anak. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang juga tetap melekat pada anak sehingga perkawinan dini tidak menghapus kesempatan anak untuk berkembang secara optimal. Dengan demikian, status perkawinan tidak dengan sendirinya menghilangkan hak anak, sehingga perlindungan hukum tetap harus diarahkan pada pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, serta tumbuh dan berkembang bagi anak yang melangsungkan pernikahan dini.

B. Saran

Berdasarkan dua kesimpulan tersebut, ketentuan mengenai batas usia perkawinan perlu terus diselaraskan dengan ketentuan mengenai perlindungan anak agar terdapat kesesuaian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sebesar 19 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Harmonisasi dan penerapan kedua ketentuan tersebut secara konsisten diharapkan dapat semakin memperkuat upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.

Penerapan batas usia perkawinan yang konsisten serta pemberian dispensasi kawin secara selektif dan sesuai dengan ketentuan hukum diharapkan dapat mengurangi terjadinya perkawinan pada usia anak. Pengetatan penerapan dispensasi dengan tetap memperhatikan kepentingan

terbaik bagi anak, hak anak, serta kondisi anak diharapkan dapat menekan pengajuan dispensasi kawin dan memperkuat tujuan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Bandung: Nusa Media;

Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti;

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,* (Refika ADITAMA, 2012);

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak,* (Indonesia, Jakarta, 2017);

Notoadmojo, *Metodologi Penelitian.* (Jakarta : Jakarta Rineka Cipta, 2011;

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2000);

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti;

Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law;*

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti;

Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2004);

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Rajawali;

Soni Dewi Judiarsih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Betty Rubiati, Hazar Kusmayanti, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,* (Bandung, 2018);

Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.* (Jakarta : Badan Penerbit Fakuktas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Jurnal Hukum

Ahmad Zaki dan Suci Ramadhona, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengadilan Agama Binjai)," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025);

Ainur Mila Rofika, Iswari Hariastuti, Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep, (The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education, 8, 1 Maret 2020);

Aisyah Amalia Nst dkk.*"Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: Literature Review.".* (Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda, 2, 2023);

Alfan Maulana, Titi Atiyatul Alawiyah, dan Firman Adi Candra, "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner (2025);

Alvina Rivini Trulia Mokolensang, Mario A. Gerungan, dan Revy S. Korah, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pernikahan Dini", Lex Privatum Vol. 11, No 5 (2023);

Arpat Rasyid, "Pendidikan sebagai Hak Konstitusional: Telaah Yuridis terhadap Kebijakan Pendidikan Dasar," *Publikasi Pendidikan* 15, no. 3 (2025);

Bintang Adi Putra dkk, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis", Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner (2025);

Cik Marhayani, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, M. Imanuddin, Analisis Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Legalitas;

Dewi Iriani, Analisis Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974, (Justia Islamica, 12 (1), 2025);

Dina Kurnita Yudianingsih, Husnul Chotimah, Kartika Rida Putri, dan Ridya Islamirza, "Problematika Pernikahan Dini dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 6, no. 1 (2022);

Farhan Zamzani, Miftahus Sholehudin, Prosesi "Malam Pacar" Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif *Maslahah Mursalah*, SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES Vol. 8 (2024),

Imelda Triadhari, Mumtaz Afridah, Hana Haifah Salsabila, *"Dampak Psikologis Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon."* (Spiritualita 7, 2, 2023);

Ina Noor Inayati, *Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM, dan Kesehatan,* Midwife Journal Vol. 1, No. 1 (2015);

Jureid, Rita Defriza, Muhlisah Lubis, Siti Khodijah, Nur Saniah, *Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Mandailing Natal.* (Journal Of Social Science Research, 3 (6), 2023);

Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, *"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar"*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol, 3, No. 1 (2022);

Majda El Muhtaj, M. Fahmi Siregar, Reh Bungana Beru PA, dan Fazli Rachman, "Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020);

Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran dalam Penelitian Hukum", *Smart Law Journal*;

Muhammad Yuslih, "Eksistensi *Awik-Awik* sebagai Legalitas Praktik Pernikahan Dini di Pulau Lombok," *Mu'addah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 11, no. 2 (2023);

Muhari Muhari, *Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban.* (Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, 2 (1), 2025);

Nabila Zahra Okta Dwiwani, "*Analisis Pengaruh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Mencegah Perkawinan Anak",* Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6, No. 4;

Nikyta Legoh, "Pelecehan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Lex Crimen* 7, no. 4 (2018);

Rifki Septiawan Ibrahim, HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, Lex Privatum;

Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Bantuan Dana Bank dalam Perspektif Pemenuhan Hak-hak EKOSOB: Studi Kasus pada Sektor Pendidikan di Indonesia", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2018,

Sri Rahmawaty Yunus, Amad Faisal, *"Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)",* (Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ), 3, 2018;

Sonny Dewi Judiasih, Nyulistiowati Suryanti, dan Deviana Yuanitasari, "Implementasi Hak Pendidikan terhadap Anak Perempuan yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur," *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2022);

Syamsul Haling, Paisal Haling, Syamsiah Badruddin, dan Hardianto Djanggih, *"Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional",* Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 2 (2018);

Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari, *"Implementasi Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*. Binamulia Hukum, Vol. 11, No. 1, (2022);

Yusmar Wulangow, Josepsus J. Pinori, Nixon Wulur, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019,* (Lex Administratum, 2022);

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

INTERNET

World Health Organization, *Constitution of the World Health Organization*, Preamble, accessed September 7, 2026.